

Implementasi Integrated Sustainability Reporting dalam Era Adopsi Standar ISSB di Indonesia: Tantangan, Peluang, dan Implikasi bagi Transparansi Perusahaan

Aisya Mauliadiana

Universitas Muhammadiyah Tangerang

e-mail: aisyamlndn@gmail.com

Article Info

Article history:

Received 08-06-2026

Revised 26-06-2026

Accepted 20-07-2026

Keyword:

integrated sustainability reporting, ISSB, IFRS S1 dan IFRS S2, transparansi korporasi, Indonesia.

ABSTRACT

Konvergensi standar akuntansi keberlanjutan global menuju kerangka International Sustainability Standards Board (ISSB) menandai babak baru dalam praktik pelaporan korporasi, termasuk di Indonesia. Artikel ini mengkaji bagaimana Indonesia bergerak dari rezim pengungkapan berbasis Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 51/POJK.03/2017 menuju penyelarasan dengan standar ISSB melalui penerbitan Pernyataan Standar Pengungkapan Keberlanjutan (PSPK) 1 dan 2 oleh Ikatan Akuntan Indonesia. Dengan menggunakan pendekatan tinjauan literatur naratif-kritis yang memadukan dokumen regulasi resmi dan literatur akademik terbitan 2022 ke atas, penelitian ini mengidentifikasi tiga temuan utama. Pertama, transisi menuju ISSB membawa perubahan paradigmatik dari pendekatan inside-out menuju kombinasi inside-out dan outside-in. Kedua, kesiapan perusahaan Indonesia masih timpang antara emiten besar dan emiten menengah-kecil, terutama dari sisi ketersediaan data, kapasitas asurans, dan sumber daya manusia. Ketiga, adopsi ini membuka peluang strategis berupa perbaikan akses pembiayaan hijau dan penguatan kredibilitas pasar modal Indonesia di mata investor global. Penelitian ini menyimpulkan bahwa keberhasilan transisi bergantung pada strategi implementasi bertahap, penguatan ekosistem asurans, dan sinkronisasi lintas regulator.



©2023 Authors. Published by Sabajaya Publisher. This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.
(<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>)

INTRODUCTION

Selama satu dekade terakhir, arsitektur pelaporan korporasi global mengalami pergeseran fundamental dari sekadar informasi keuangan menuju informasi lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG) yang dipandang investor institusional sebagai bagian tak terpisahkan dari penilaian risiko dan prospek jangka panjang. Hingga pertengahan 2023, lebih dari lima ribu investor institusional dengan aset kelolaan melampaui seratus dua puluh triliun dolar Amerika Serikat telah berkomitmen mengintegrasikan pertimbangan ESG ke dalam proses investasi (PRI, 2023, dalam Chowdhury et al., 2024). Namun, tingginya permintaan tersebut tidak diimbangi pasokan pengungkapan yang memadai, diperparah oleh fragmentasi kerangka pelaporan keberlanjutan global (GRI, SASB, TCFD, IIRC) yang berkembang paralel tanpa mekanisme rekonsiliasi yang jelas (Enhesa, 2023).

Untuk menjawab fragmentasi tersebut, IFRS Foundation membentuk International Sustainability Standards Board (ISSB) pada COP26 tahun 2021 dan menerbitkan IFRS S1 serta IFRS S2 pada 26 Juni 2023 sebagai baseline global pengungkapan keberlanjutan dan iklim, efektif berlaku sejak periode pelaporan yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2024 (IFRS Foundation, 2023; Deloitte, 2023). Indonesia turut menyelaraskan diri dengan menerbitkan Peta Jalan Standar Pengungkapan Keberlanjutan (SPK) melalui Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) pada Desember 2024, dan mengesahkan Pernyataan Standar Pengungkapan Keberlanjutan (PSPK) 1 dan 2 pada 1 Juli 2025 yang mengadopsi IFRS S1 dan S2, berlaku efektif mulai 1 Januari 2027 (IAI, 2025; IFAC, 2025). Langkah

ini menggantikan rezim POJK Nomor 51/POJK.03/2017 yang berperspektif inside-out dengan pendekatan yang juga mengakomodasi perspektif outside-in sebagaimana dianut ISSB (RSM Indonesia, 2025).

Perubahan lanskap regulasi ini menuntut perusahaan Indonesia merombak sistem pelaporan secara mendasar, dari pengungkapan naratif berbasis GRI menuju data kuantitatif yang terhubung dengan laporan keuangan, mempertimbangkan skenario risiko iklim, serta menyediakan jejak audit yang memadai untuk asuransi (Binus Accounting, 2025).

Kajian akademik mengenai adopsi IFRS S1 dan S2 di Indonesia berkembang pesat sejak 2023, namun sebagian besar bersifat parsial dan terfragmentasi, mulai dari studi agregat yang menemukan hanya sekitar 3,24 persen emiten Indonesia yang siap menerapkan standar tersebut (UGM, t.t.), hingga studi kasus tunggal seperti PT Aneka Tambang Tbk (Jurnal Akuntansi Kompetitif, 2026), PT Perusahaan Listrik Negara (Simorangkir & Shauki, 2024), dan PT Dharma Satya Nusantara Tbk (ResearchGate, 2026). Studi-studi tersebut jarang menautkan temuan mikro-perusahaan dengan dinamika makro kebijakan nasional secara komprehensif, dan jarang membandingkan lintasan adopsi Indonesia dengan yurisdiksi lain seperti Brazil, Australia, dan Uni Eropa (CPA Journal, 2024; Mitiga Solutions, 2025; Enhesa, 2023). Kesenjangan penelitian inilah yang mendasari artikel ini.

Berangkat dari kesenjangan tersebut, artikel ini bertujuan memetakan tuntutan investor global terhadap informasi ESG, menganalisis langkah kebijakan Indonesia dalam mengadopsi standar ISSB, mengevaluasi kesiapan dan tantangan riil perusahaan Indonesia dengan studi kasus PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, serta merumuskan implikasi kebijakan bagi regulator, penyusun standar, dan korporasi.

RESEARCH METHODS

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif-analitis yang memadukan studi literatur dan analisis dokumen, dipilih karena tujuan penelitian bersifat eksploratif-kritis ketimbang menguji hubungan kausal antarvariabel secara statistik. Sumber data terdiri atas tiga kategori: dokumen resmi regulator dan badan penyusun standar (IFRS S1 dan S2, Peta Jalan SPK, draf PSPK 1 dan 2, serta rancangan peraturan OJK); artikel jurnal ilmiah dan working paper akademik terbitan 2022–2026; serta laporan keberlanjutan dan publikasi resmi perusahaan objek studi kasus, yaitu PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (ICSO, 2025).

Teknik analisis yang digunakan adalah analisis isi (content analysis) yang diarahkan pada pemetaan kesesuaian praktik pelaporan dengan empat pilar inti IFRS S1 dan S2 — tata kelola, strategi, manajemen risiko, serta metrik dan target — untuk mengidentifikasi pola kesenjangan yang berulang, sebelum dianalisis melalui lensa legitimacy theory, stakeholder theory, dan signaling theory. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan temuan studi akademik, laporan konsultan profesional, serta publikasi resmi IAI dan OJK. Penelitian ini memiliki keterbatasan karena bersifat studi literatur dan belum melibatkan wawancara primer langsung dengan pelaku industri.

RESULTS AND DISCUSSION

Proporsi investor institusional yang mengintegrasikan pertimbangan ESG ke dalam keputusan investasi terus meningkat secara konsisten (Cepêda et al., 2025). Investor berhorizon jangka panjang cenderung berperan sebagai pemantau aktif yang menuntut pengungkapan substantif, sementara investor jangka pendek cenderung pasif (Cepêda et al., 2025), sebuah kondisi yang membuat peran regulator dalam mewajibkan pengungkapan menjadi krusial bagi pasar modal Indonesia yang masih didominasi investor ritel dan jangka pendek. Standardisasi melalui IFRS S1 dan S2 merupakan jawaban struktural atas information gap dan disagreement antar-lembaga pemeringkat ESG yang selama ini menghambat alokasi modal yang efisien (GRASFI, 2024; Enhesa, 2023).

ISSB mengonsolidasikan TCFD, CDSB, dan Value Reporting Foundation (termasuk SASB dan IIRC) ke dalam satu arsitektur standar yang koheren, dengan TCFD resmi dibubarkan pada Oktober 2023 (Enhesa, 2023). IFRS S1 dan S2 dibangun di atas empat pilar — tata kelola, strategi, manajemen risiko, serta metrik dan target — dan menganut konsep materialitas tunggal yang selaras dengan materialitas akuntansi keuangan IFRS, berbeda dari materialitas ganda yang dianut Uni Eropa melalui CSRD/ESRS (CPA Journal, 2024; Harvard Law School Forum, 2023).

Indonesia menempuh empat fase adopsi: fondasi regulasi melalui POJK 51/2017 (RSM Indonesia, 2025); pembentukan DPSK dan DSK IAI pada November 2023 (IAI, 2024); penerbitan Peta Jalan SPK dengan strategi climate first pada Desember 2024, mencakup uji coba Climate Risk Management and Scenario Analysis (CRMS) pada delapan belas bank dan perluasan Taksonomi Keberlanjutan Indonesia (RSM Indonesia, 2025); serta pengesahan PSPK 1 dan 2 pada 1 Juli 2025 yang efektif berlaku 1 Januari 2027, menempatkan Indonesia sebagai salah satu dari tiga puluh tiga yurisdiksi pengadopsi kerangka ISSB (IAI, 2025; IFAC, 2025). Per awal 2026, OJK membuka konsultasi publik rancangan peraturan kewajiban pelaporan berbasis PSPK 1 dan 2 hingga 13 Maret 2026 (IAS Plus, 2026).

Dibandingkan Brazil yang mewajibkan penuh ISSB Standards pada 2026 setelah penerapan sukarela sejak 2024 (CPA Journal, 2024), serta Australia, Uni Eropa, Turki, dan Nigeria yang telah memberlakukan standar setara sejak 2024 (IAI, 2024; IAS Plus, 2026), lintasan adopsi Indonesia yang membutuhkan hampir empat tahun mencerminkan kesadaran regulator akan keterbatasan kesiapan ekosistem domestik, namun juga berisiko membuka jendela waktu yang panjang bagi perusahaan untuk menunda transformasi substantif.

Kesiapan riil perusahaan Indonesia masih jauh tertinggal, dengan hanya sekitar 3,24 persen emiten tergolong siap (UGM, t.t.). Pada pilar tata kelola, perusahaan besar umumnya telah memiliki struktur komite keberlanjutan (Jurnal Akuntansi Kompetitif, 2026), namun kesenjangan paling menonjol terjadi pada pilar strategi dan manajemen risiko akibat lemahnya integrasi risiko iklim ke dalam enterprise risk management (Jurnal Akuntansi Kompetitif, 2026; Simorangkir & Shauki, 2024). Pada pilar metrik dan target, banyak perusahaan menyerahkan penghitungan emisi sepenuhnya kepada konsultan eksternal karena keterbatasan kapasitas internal (Eduvest, t.t.), sementara tantangan lintas-pilar yang paling mendasar adalah rendahnya pemahaman manajemen terhadap substansi teknis standar internasional serta keterbatasan waktu pelaporan (UGM, t.t.; Eduvest, t.t.; CPA Journal, 2024).

Studi kasus PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk menunjukkan bahwa bank ini telah menerapkan kerangka CRMS yang disusun OJK, menyelaraskan praktiknya dengan TCFD dan ISSB, serta mengintegrasikan ESG ke dalam desain produk pembiayaan berkelanjutan dan credit lifecycle nasabahnya (ICSO, 2025). Namun demikian, kapasitas BRI sangat ditopang oleh statusnya sebagai bank besar dengan pendampingan langsung OJK, sehingga menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai replikasi praktik tersebut pada emiten menengah atau sektor riil non-keuangan yang justru menunjukkan kesenjangan jauh lebih besar (Jurnal Akuntansi Kompetitif, 2026; Simorangkir & Shauki, 2024; ResearchGate, 2026).

Di tengah tantangan tersebut, adopsi IFRS S1 dan S2 membuka peluang strategis berupa penguatan daya tarik perusahaan Indonesia di mata investor internasional (Springer Discover Sustainability, 2025), penekanan biaya kepatuhan ganda (Grant Thornton, 2023), keunggulan kompetitif bagi perusahaan yang lebih dahulu berinvestasi pada sistem data keberlanjutan (Postiglione, 2024), serta perluasan akses pembiayaan hijau bagi sektor keuangan (ICSO, 2025). Peluang ini hanya dapat direalisasikan apabila perusahaan memandang pengungkapan sebagai instrumen strategis, bukan sekadar beban kepatuhan, mengingat risiko greenwashing atau ESG decoupling tetap nyata ketika pengungkapan lebih didorong tekanan eksternal ketimbang komitmen internal manajemen (Cepêda et al., 2025; Tandfonline, 2024).

Secara keseluruhan, transisi menuju integrated sustainability reporting berbasis ISSB di Indonesia berada pada titik kritis: kerangka kebijakan telah relatif matang, namun kapasitas implementasi di level perusahaan masih tertinggal. Implikasinya mencakup perlunya penguatan asurans independen (CPA Journal, 2024), diferensiasi pendekatan regulasi berdasarkan skala dan kapasitas perusahaan sejalan dengan prinsip proporsionalitas ISSB (IFRS Foundation, 2023), serta penguatan kapasitas sumber daya manusia agar tidak bergantung berlebihan pada konsultan eksternal (Eduvest, t.t.).

CONCLUSION

Meningkatnya tuntutan investor global terhadap informasi ESG serta fragmentasi kerangka pelaporan keberlanjutan menjadi pendorong utama lahirnya IFRS S1 dan IFRS S2 oleh ISSB pada 2023 sebagai baseline global pengungkapan keberlanjutan yang terintegrasi dengan laporan keuangan.

Indonesia telah menempuh langkah kebijakan progresif melalui pembentukan DPSK dan DSK IAI, penerbitan Peta Jalan SPK, serta pengesahan PSPK 1 dan 2 yang berlaku efektif mulai 1 Januari 2027.

Meskipun kerangka regulasi telah relatif matang, kesiapan riil perusahaan Indonesia masih rendah, dengan kesenjangan paling menonjol pada pilar strategi, manajemen risiko, serta metrik dan target. Studi kasus PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk menunjukkan bahwa institusi keuangan besar dengan dukungan pendampingan regulator mampu mengintegrasikan manajemen risiko iklim secara relatif matang, namun replikasi praktik tersebut pada emiten sektor riil berskala menengah masih menghadapi kendala struktural yang signifikan. Keberhasilan transisi pada akhirnya bergantung pada sinergi antara regulator, badan penyusun standar, dan korporasi, serta kesediaan perusahaan memandang pengungkapan keberlanjutan sebagai instrumen strategis ketimbang sekadar formalitas kepatuhan.

Bagi regulator, OJK dan IAI perlu mempercepat penyusunan panduan teknis implementasi yang spesifik per sektor industri serta memperkuat mekanisme asurans independen. Bagi korporasi, langkah paling mendesak adalah membangun kapasitas internal untuk mengukur dan memverifikasi data emisi secara mandiri serta mengintegrasikan fungsi keberlanjutan dengan fungsi keuangan dan manajemen risiko. Bagi penelitian mendatang, disarankan pengembangan studi empiris berskala lebih luas serta studi komparatif lintasan adopsi ISSB Standards antara Indonesia dengan negara ASEAN lainnya.

REFERENCES

- Cepêda, C., et al. (2025). Bridging the ESG credibility gap: The role of institutional investors in mitigating ESG decoupling. *Business Strategy and the Environment*. <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/bse.4336>
- Chowdhury, R., et al. (2024). Institutional investors' behind-the-scene monitoring and ESG disclosure. GRASFI Working Paper. https://sustainablefinancealliance.org/wp-content/uploads/2024/06/GRASFI_2024_paper_19.pdf
- Deloitte. (2023). Global sustainability disclosure standards converge: ISSB finalizes IFRS S1 and IFRS S2. <https://dart.deloitte.com/USDART/home/publications/deloitte/heads-up/2023/global-sustainability-disclosure-standard-coverage-issb-finalizes-ifrs-s1-s2>
- Eduvest Journal. (t.t.). Evaluation of readiness for implementing IFRS S1 and S2. <https://eduvest.greenvest.co.id/index.php/edv/article/download/52211/4767>
- Enhesa. (2023). Understanding the ISSB standards. <https://www.enhesa.com/resources/article/understanding-the-issb-standards/>
- Grant Thornton. (2023). IFRS S1 and IFRS S2: Overview. <https://www.grantthornton.global/en/insights/articles/overview-of-ifrs-s1-and-ifrs-s2/>

- Harvard Law School Forum on Corporate Governance. (2023). Inside the IFRS S1 and S2 sustainability disclosure standards. <https://corpgov.law.harvard.edu/2023/08/22/inside-the-ifsrs-s1-and-s2-sustainability-disclosure-standards/>
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2024). Peta Jalan Standar Pengungkapan Keberlanjutan (Roadmap SPK). https://web.iaiglobal.or.id/assets/files/file_sak/Roadmap%20SPK_English.pdf
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2024). Era baru pengungkapan keberlanjutan: Sinergi OJK dan IAI dalam adopsi IFRS S1 & S2. https://web.iaiglobal.or.id/BeritaIAI/detail/era_baru_pengungkapan_keberlanjutan_sinergi_oj_k_dan_iai_dalam_adopsi_ifrs_s1_s2
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2025). Indonesia launches sustainability disclosure standards based on IFRS S1 and S2. https://web.iaiglobal.or.id/BeritaIAI/detail/indonesia_launches_sustainability_disclosure_standards_based_on_ifrs_s1_and_s2
- IFRS Foundation. (2023). General sustainability-related disclosures (IFRS S1 and IFRS S2). <https://www.ifsrs.org/projects/completed-projects/2023/general-sustainability-related-disclosures/>
- Indonesia Corporate Sustainability Outlook (ICSO). (2025). Indonesia Corporate Sustainability Outlook 2025. <https://icsolohkarsa.com/media-center/NQ==>
- International Federation of Accountants. (2025). How Ikatan Akuntan Indonesia strengthened Indonesia's role in the global sustainability reporting landscape. <https://www.ifac.org/knowledge-gateway/discussion/how-ikatan-akuntan-indonesia-strengthened-indonesia-s-role-global-sustainability-reporting-landscape>
- IAS Plus. (2026). Indonesian regulator consults on mandating sustainability reporting aligned with ISSB standards. <https://www.iasplus.com/en/news/2026/02/indonesia-issb>
- Jurnal Akuntansi Kompetitif. (2026). Analisis kesiapan implementasi IFRS S1 dan S2 pada industri nikel di Indonesia: Studi kasus PT Antam Tbk. <https://ejournal.kompetitif.com/index.php/akuntansikompetitif/article/view/2585>
- Krueger, P., Sautner, Z., Tang, D. Y., & Zhong, R. (2024). The effects of mandatory ESG disclosure around the world. *Journal of Accounting Research*. <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/1475-679X.12548>
- Mitiga Solutions. (2025). What are IFRS S1 and IFRS S2? Key differences, deadlines, and who it applies to. <https://www.mitigasolutions.com/blog/ifrs-s1-and-ifrs-s2>
- Postiglione, A. (2024). ESG and firm value: A hybrid literature review on cost of capital implications from Scopus database. *Corporate Social Responsibility and Environmental Management*. <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/csr.2940>
- ResearchGate. (2026). Analisis penerapan IFRS S1 pada sustainability reporting PT Dharma Satya Nusantara Tbk tahun 2024. <https://www.researchgate.net/publication/399278107>
- ResearchGate. (2024). Penerapan IFRS S1 dan S2 pada sustainability reporting PT PLN (Persero) (Simorangkir & Shauki, 2024). <https://www.researchgate.net/publication/388181747>
- RSM Indonesia. (2025). Indonesia: The future of business — Evolving through ESG and climate reporting. <https://www.rsm.global/australia/esg-and-climate-reporting-apac/indonesia>
- The CPA Journal. (2024). The ISSB's new sustainability disclosure standards. <https://www.cpajournal.com/2024/04/03/the-issbs-new-sustainability-disclosure-standards/>
- Universitas Gadjah Mada. (t.t.). Analisis kesiapan penerapan IFRS Sustainability Disclosure Standards bagi emiten di Indonesia. <https://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/256306>

-
- Universitas Indonesia. (t.t.). Evaluasi kesiapan penerapan IFRS S1 dan S2 sesuai pedoman Sustainable Stock Exchange: Studi kasus pada PT X. <https://lib.ui.ac.id/detail?id=9999920566371&lokasi=lokal>
- Universitas Bina Nusantara (Binus Accounting). (2025). IFRS S1 & S2 sustainability standards: Preparing Indonesia for the 2027 deadline. <https://accounting.binus.ac.id/2025/12/18/ifrs-s1-s2-sustainability-standards-preparing-indonesia-for-the-2027-deadline/>
- Tandfonline. (2024). Environmental, social and governance (ESG) disclosure motives for environmentally sensitive industry: An emerging economy perspective. Cogent Business & Management. <https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/23311975.2024.2322027>
- Springer, Discover Sustainability. (2025). The influence of environmental, social, and governance disclosure on market reaction: Evidence from emerging markets. <https://link.springer.com/article/10.1007/s43621-025-01085-0>
- van Wyk, M., & Els, G. (2023). The relevance of integrated reporting in future standard setting of the International Sustainability Standards Board. *Frontiers in Sustainability*, 4, 1218985.